Kepemimpinan Wali Nagari

(Studi di Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan)

SKRIPSI

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :
ZULMAINI
TM/ NIM : 2008/05622

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	: **Kepemimpinan Wali Nagari (Studi di Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan)**
Nama	: ZULMAINI
TM/NIM	: 2008/05622
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 5 Juni 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Helmi Hasan, M. Pd	**Drs. Ideal Putra, M. Si**
NIP. 19490614 197503 1002	**NIP. 19630723 198602 1001**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis 5 Juni 2014 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

Kepemimpinan Wali Nagari (Studi di Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan)

Nama	**: ZULMAINI**
TM/NIM	**: 2008/05622**
Program Studi	**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	**: Ilmu Sosial Politik**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 5 Juni 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. H. Helmi Hasan, M. Pd	
Sekretaris	: Drs. Ideal Putra M.Si	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M. Hum	
Anggota	: Dra. Hj. Aina, M. Pd	
Anggota	: Junaidi Indrawadi, S. Pd. M.Pd	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZULMAINI
TM/NIM	: 2008/05622
Tempat/Tanggal Lahir	: Buluh Kasok / 19 Agustus 1989

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Kepemimpinan Wali Nagari (Studi di Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan)" adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 5 Juni 2014

Saya yang menyatakan

ZULMAINI
05622/2008

ABSTRAK

Zulmaini, TM/NIM : 2008/05622, Kepemimpinan Wali Nagari (Studi di Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya keputusan-keputusan yang dibuat oleh wali Nagari Padang Aia Dingin dan kurangnya kerjasama wali Nagari dengan pemerintahan Nagari Padang Aia Dingin didalam membuat keputusan, sehingga banyak masyarakat yang merasa kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin saat ini tidak optimal. Pembatasan permasalahan kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin ditinjau dari prespektif nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepemimpinan wali Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung dan wawancara menggunakan alat berupa pedoman wawancara dan lembaran observasi dengan informan penelitian wali Nagari, pegawai kantor wali, Tokoh masyarakat, tungku tigo sajarangan Nagari padang Aia Dingin menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik Trianggulasi sumber.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan yang ditunjukan oleh wali Nagari Padang Aia Dingin yaitu adalah gaya kepemimpinan Direktif. Wali Nagari Padang Aia Dingin bersifat diktator dalam memimpin, tanpa mau menerima masukan, kritikan dan saran dari bawahan dan masyarakatnya. kendala-kendala yang menyebabkan tekendalanya pengamalan nilai-nilai yang terkandung didalam sila pancasila adalah, faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal yaitu sifat dan perilaku yang ditunjukan oleh wali Nagari didalam kehidupan sehari-hari baik terhadap bawahan maupun masyarakat. Faktor eksternal yaitu keadaan situasi masyarakat yang susah diajak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan Nagari dan tidak mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sedangkan faktor eksternal yaitu situasional dan masyarakat. Upaya yang dilakukan di dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dengan cara mengajak wali Nagari bermusyawarah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat yang dicintainya sebagai bekal dunia akhirat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul **"Kepemimpinan Wali Nagari (Studi di Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan)".**

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Politik Universitas Negeri Padang.
2. Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu sosial Politik.
3. Dr. Fatmariza, M.Hum. selaku Ketua Prodi PPKn.
4. Dr. Helmi Hasan, M.Pd. sebagai Pembimbing I dan Drs. Ideal Putra, M.Si selaku Pembimbing II.
5. Dra. Fatmariza, M.Hum., Dra. Aina, M.Pd. dan Junaidi indrawadi,S.Pd,M.Pd selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
7. Wali Nagari Padang Aia Dingin beserta karyawan/ti di kantor Wali Nagari Padang Aia Dingin yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil dan rekan-rekan mahasiswa Prodi PPKn Jurusan ilmu sosial politik angkatan 2008 yang saling memberikan motivasi serta semangatnya.

Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah..... 8
C. Fokus Penelitian 9
D. Tujuan Penelitian..... 10
E. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI TEORITIS..... 11
1. Pengertian Kepemimpinan..... 11
2. Kepemimpianan Wali nagari..... 16
3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan..... 20
4. Gaya Kepemimpinan..... 20
5. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila..... 21
6. Kendala-Kendala..... 30
7. Upaya Mengatasi Kendala..... 30
8. Penelitian Yang Relevan..... 32

B. KERANGKA KONSEPTUAL..... 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 34
B. Lokasi Penelitian..... 34
C. Informan Penelitian..... 35
D. Jenis, Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data..... 36

E. Teknik Uji Keabsahan Data..... 39
F. Teknik Analisa Data..... 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 43
1. Temuan umum..... 43
2. Temuan khusus..... 59
a. gaya kepemimpinan wali Nagari Padang Aia Dingin..... 59
b. Kendala-kendala didalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.. 69
c. Upaya didalam mengatasi Kendala..... 80
B. Pembahasan..... 86
1. gaya kepemimpinan wali Nagari Padang Aia Dingin..... 86
2. Kendala-kendala didalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.. 95
3. Upaya didalam mengatasi Kendala..... 100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 102
B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Skala Prioritas Pembangunan Nagari Padang Aia Dingin Tahun 2013.....	5
Tabel 2	Distribusi Raskin Di Kenagarian Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013.....	7
Tabel 3	Informan Penelitian.....	35
Tabel 4	Tabel Nama Jorong di Nagari Padang Aia Dingin.....	43
Tabel 5	Jumlah Penduduk Nagari Padang Aia Dingin Berdasarkan Jumlah Jorong.....	44
Tabel 6	Jumlah Penduduk Kenagarian Padang Aia Dingin berdasarkan tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 7	Jumlah Penduduk Kenagarian Padang Aia Dingin Solok Selatan dilihat Dari latar Belakang Mata Pencaharian.....	49
Tabel 8	Jumlah Pendapatan Penduduk Kenagarian Padang Aia Dingin Solok Selatan Berdasarkan dari Latar Belakang Mata Pencaharian.....	50
Tabel 9	Jumlah Penduduk yan gTIdak Bekerja di Kenagarian Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan Dari Tahun 2011 s/d 2013.....	51
Tabel 10	Jumlah Penduduk Miskin di Kenagarian Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan Pada Tahun 2013.....	52
Tabel 11	Jumlah Penduduk Miskin di Kenagarian Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan Dari Tahun 2011 s/d Tahun 2013.....	53
Tabel 12	Sarana Prasarana di Kenagarian Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sarana Transportasi di nagari Padang Aia Dingin.....	58
Gambar 2	Jembatan Buluh Kasok.....	58
Gambar 3	Kantor Wali Nagari Padang Aia Dingin.....	59
Gambar 4	Bentuk Musyawarah di nagari Padang Aia Dingin.....	64
Gambar 5	Gambar Masyarakat Gotong Royong.....	66
Gambar 6	Pelanggaran Peraturan Oleh Masyarakat.....	77
Gambar 7	Masyarakat Menjemur Pakaian di Halaman.....	77
Gambar 8	Masyarakat Bermusyawarah.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya penjelasan pasal 18 menyebutkan bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa itu adalah seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang Kabau , Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dalam segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak, asal-usul daerah tersebut.

Undang-undang No 22 tahun 1999 di ubah menjadi Dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut kepala daerah diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan keputusan undang-undang tersebut pemerintah Sumatera Barat beserta masyarakatnya menyatukan pendapat untuk kembali kepemerintahan Nagari. Kembali kepada pemerintahan Nagari pada hakekatnya didasarkan pada hasil pemikiran dari seluruh lapisan masyarakat Minangkabau. Alasan tersebut sesuai dengan pendapat Damsar Lubis (2001:56) mengemukakan bahwa alasan kembali ke Nagari adalah sesuai dengan sprit untuk kembalinya ke alam demokrasi dalam kedaulatan rakyat sebagai fanatisme

kenegaraan, lebih lanjut Lubis mengemukakan alasan kembali ke Nagari adalah: untuk mengembalikan peran serta lapisan masyrakat (termasuk perantau) serta demokratis dengan msyarakat nilai-nilai budaya Minang Kabau peran lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat masyarakat di Nagari.

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Hak tersebut diperoleh daerah melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintahan atau daerah tingkat atas melalui desentralisasi sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Djohermansyah Djohan. 1990:52)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintah untuk mengatur dan mengurus kepentingan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut pengertian pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 05 pasal 1 tahun 2007 adalah penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu diantara 19 Kabupaten / Kota yang ada dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Solok. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah akhirnya Kabupaten

Solok Selatan memisahkan diri dari Kabupaten Solok. Hal ini dilakukan agar bisa pelayanan pemerintahan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat-perangkat Nagari. Perangkat Nagari adalah unsur staf yaitu Wali Nagari, Sekretaris Kepala Jorong, sedangkan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) terdiri atas Pemuka masyarakat yaitu, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang serta pemuda yang ada di Nagari. Konsepsi Pemerintahan Nagari adalah berdiri dengan adatnya yang mengatur diri sendiri diwilayah masing-masing yang mengambarkan Nagari mempunyai kemerdekaan yang penuh dalam struktur sosial yang dikenal adat Salingka Nagari.

Setiap Nagari mempunyai pemimpin atau wakil untuk mengatur dan mengembangkan Nagari tersebut, tanpa ada pemimpin tidak mungkin suatu Nagari bisa berkembang dengan baik. Pemimpin menurut Kartini Kartono (2004:33) adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan disuatu bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan dan mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan.

Pemimpin adalah bagaimana ia mampu mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang mengarah pada pembagunan Nagari. Dalam rangka memajukan kepemimpinan Wali Nagari di Padang Aia Dingin maka dituntut seorang pemimpin yang baik guna untuk mengatur dan mengembangkan Nagari tersebut, Tanpa ada pemimpin tidak

mungkin suatu nagari bisa berkembang dengan baik. Seorang Wali Nagari diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya dapat meningkatkan kualitas kepemimpinannya yaitu dengan melaksanakan tugas dengan optimal, dan dalam menjalankan tugasnya seorang Wali Nagari harus mengacu kepada nilai-nilai pancasila, jika seorang wali Nagari mampu mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kepemimpinannya, maka kepemimpinannya tersebut akan menjadi optimal. Wali Nagari yang baik, Wali Nagari yang senantiasa memperlihatkan tingkah laku yang berpegang teguh pada nilai- nilai dan norma- norma yang ada ketika Ia berkomunikasi dengan perangkat Nagari dalam membuat keputusan.

Kepemimpinan wali Nagari Di Padang Aia Dingin masih belum optimal, karena masih banyak pembangunan-pembangunan yang belum terealisai seperti jalan sebagai akses vital pengerak perekonomian masyarakat masih kurang baik untuk daerah padang Aia dingin masih banyak jalan yang berlobang terlebih lagi untuk jorong buluh kasok yang berada di sebelah jorong padang Aia dingin yang dibatasi oleh sungai juga belum memilki akses transportasi yang baik. Untuk masyarakat beriteraksi dengan daerah lainnya hanya bisa menggunakan jembatan yang hanya dilalui kendaraan roda dua.

Hal ini disebabkan oleh kurang tanggapnya wali Nagari terhadap informasi mengenai dana yang akan dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kerena itu untuk memeperoleh dana secara cepat harus mempunyai Perpanjangan tangan di DPRD. (wawancara langsung dengan Wali Jorong Yonharisman Dt. Tunaro tanggal 9 Agustus 2013).

Tabel 1
Daftar Skala Prioritas Pembangunan Nagari Padang Aia Dingin
Tahun 2013

No	Bidang	Jumlah kegiatan	Keterangan
1.	Bidang Prasarana Jalan	4	Belum terealisasi
2.	Bidang prasaranaJembatan	2	Belum terealisasi
3.	Bidang Sarana Prasarana Gedung	9	Belum terealisasi
4.	Bidang irigasi	2	Belum terealisasi
5.	Bidang ekonomi	6	Belum terealisasi
6.	Bidang sarana sosial budaya	7	Belum terealisasi
Jumlah		30	

Sumber: Data ini diambil diKantor Wali Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 18 Februari 2013

Tabel 1 dapat menjelaskan bahwa begitu banyaknya daftar skala prioritas pembangunan Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2013, begitu banyak skala prioritas pembangunan Nagari Padang Aia Dingin yang belum terealisasi, yaitu bidang prasarana jalan 4 kegiatan, bidang prasarana jembatan 2 kegiatan, bidang prasarana gedung 9 kegiatan dan bidang irigasi 2 kegiatan, bidang ekonomi 6 kegiatan dan bidang sarana social budaya 7 kegiatan. Begitu banyaknya pembangun yang belum terealisasi didalam kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin pada tahun 2013. Karena, kurang tanggapnya wali Nagari Padang Aia Dingin didalam menanggapi informasi mengenai dana yang akan dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan.

Pemerintah Nagari dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari), Unsur dalam Bamus memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. Bamus berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Bamus memiliki peranan penting didalam membantu wali Nagari didalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya didalam membuat peraturan-peraturan dalam Nagari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu anggota Badan Musyawarah Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan Bapak Syukri Wahab mengatakan bahwa Wali Nagari jarang sekali mengajak Bamus untuk bermusyawarah didalam membuat peraturan Nagari. Contoh dalam membuat aturan nagari tentang Larangan Penerimaan Tamu diatas jam 21:00 Peraturan Wali Nagari No 3 Tahun 2008. Masyarakat merasa, aturan wali Nagari tersebut, dapat merugikan masyarakat, karena kadangkala tamu yang datang ada keperluan penting. (Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2014) . Bentuk kerugian masyarakat dalam aturan ini adalah kadangkala masyarakat yang bertamu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan urusan pekerjaan, tetapi karena larangan bertamu tersebut menyebabkan urusan pekerjaan tidak berjalan dengan baik

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bamus diatas, berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Aia Dingin Solok Selatan Bapak Abdul Manaf, Wali Nagari Padang Aia Dingin saat ini sering tidak mengadakan musyawarah terlebih dahulu didalam membuat suatu aturan yang akan dipakai didalam kehidupan masyarakat Nagari Padang Aia Dingin. Wali Nagari lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri terlebih dahulu didalam membuat aturan, tanpa memprioritaskan kepentingan masyarakat

Nagari Padang Aia Dingin. Contoh dalam pemberian beras miskin (Raskin) masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut yaitu masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Wali Nagari Padang Aia Dingin. (Wawancara Langsung tanggal 18 Februari 2014). Dapat dilihat lebih jelas dari tabel di bawah:

Tabel 2
Distribusi Beras Miskin Di Kenagarian Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013

No	Jorong	Jumlah	Keterangan
1.	Jorong Buluh Kasok	30 KK	
2.	Jorong Sikayan Talang	26 KK	
3.	Jorong Padang Aia Dingin	43 KK	
4.	Jorong Koto Japang	34 KK	
Jumlah		133 KK	

Sumber: Data Kantor Wali Nagari Padang Aia Dingin 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa diantara 4 Jorong di Nagari Padang Aia Dingin, di Jorong Buluk Kasok berjumlah 30 KK, Jorong Sikayan Talang berjumlah 26 KK, Jorong Padang Aia Dingin 43 KK, dan Jorong Koto Japang berjumlah 34 KK. Pendistribusian beras miskin di Nagari Padang Aia Dingin keseluruhannya merata di setiap jorong, tetapi dari 133 Kepala Keluarga yang mendapatkan beras miskin, hampir 20% Kepala Keluarga memiliki hubungan kekeluargaan dengan Wali Nagari.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan mewawancarai salah seorang masyarakat di Kenagarian Padang Aia Dingin Bapak Rozi bahwa, pada saat ini Wali Nagari di Kenagarian Padang Aia Dingin sering mengambil keputusan sendiri didalam membuat aturan di masyarakat, tanpa meminta persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat Nagari Padang Aia Dingin. Sehingga sering menimbulkan masalah didalam masyarakat. (Wawancara langsung pada tanggal 05 Desember 2013).

Jadi berdasarkan penuturan informan-informan pada observasi tadi dapat kita lihat bahwa kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin tidak mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dimana sama-sama kita ketahui didalam sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dapat kita simpulkan juga dalam kepemimpinanya wali Nagari Padang Aia Dingin, belum menjalankan tugasnya secara optimal.

Berdasarkan latar belakang disinilah penulis tertarik untuk melihat Kepemimpinan menurut Nilai-nilai Pancasila. Yang akan penulis tuangkan didalam penelitian yang berjudul "**Kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan**"

B. Identifikasi masalah, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pada penelitian ini dapat identifikasi sebagai berikut:

a. Kurangnya keterlibatan Bamus dalam pengambilan keputusan didalam Nagari.
b. Tidak adanya pengamalan nilai-nilai Pancasila didalam Kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin.
c. Adanya aturan yang dibuat oleh Wali Nagari tanpa musyawarah dengan Bamus.
d. Kepemimpinan Wali Nagari belum optimal dalam memimpin Nagari.

2. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar tidak terjadi pengambangan dalam pembahasan penelitian ini, Maka penulis membatasi masalah yaitu kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin ditinjau dari prespektif nilai-nilai Pancasila.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana gaya kepemimpinan Wali Nagari dalam mengamalkan Nilai-nilai Pancasila di Padang Aia Dingin?
b. Kendala-kendala apa yang menyebabkan kurang Optimal Kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin?
c. Upaya apa yang dilakukan masyarakat didalam meminimalisirkan kendala-kendala diatas?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah gaya Kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin Kabupaten Solok Selatan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar Belakang dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin didalam mengamalkan Nilai-nilai Pancasila.

2. Mengidentifikasi Kendala-kendala yang menyebabkan Kepemimpinan Wali Nagari Padang Aia Dingin kurang Optimal.
3. Mengidentifikasi Upaya yang dilakukan masyarakat didalam meminimalisirkan kendala-kendala diatas.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermamfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan secara teoritis khususnya berkaitan dengan pemimpin Wali Nagari.
2. Secara Praktis
    a. Bahan masukan bagi Wali Nagari selaku pemimpin dalam sebuah Nagari.
    b. Bahan masukan bagi masyarakat di dalam nagari supaya kedepannya bisa ikut partisipasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Nagari.
    c. Bahan masukan bagi peneliti di masa akan datang.